

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era Revolusi Industri 4.0 dengan persaingan global yang dinamis, pengetahuan merupakan pilar utama dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Saat ini, fungsi pengetahuan mencakup hampir seluruh aspek operasional, dimana setiap individu dituntut memiliki kemampuan adaptasi tinggi akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Pengetahuan turut berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan inovasi dan daya saing, salah satunya bagi sebuah organisasi atau lembaga. Keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas sangat diperlukan oleh para individu dalam sebuah organisasi, karena efektivitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya finansial atau infrastruktur fisik, tetapi juga oleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki anggotanya. Oleh sebab itu, setiap organisasi atau lembaga diharapkan memiliki mekanisme kontrol yang kuat untuk menghadapi perubahan dan regulasi yang dinamis, yaitu dengan adanya penjaminan mutu. Mutu merupakan hal penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas suatu organisasi. Mutu juga berperan dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik, baik bagi perusahaan jasa maupun instansi pemerintah. Di tengah persaingan yang ketat, mutu dapat membantu organisasi atau lembaga mempertahankan standar tinggi yang turut memengaruhi keberlangsungan dan legitimasi dari organisasi atau lembaga tersebut. Selain itu, mutu juga merupakan pilar utama dalam menumbuhkan budaya kerja yang unggul dan bertanggung jawab. Melalui penjaminan mutu, nilai-nilai seperti integritas, disiplin, ketelitian, dan komitmen terhadap kesempurnaan dapat ditanamkan sebagai bekal untuk bersaing di era globalisasi saat ini.

Organisasi adalah sebuah sistem yang saling memengaruhi antar individu dalam kelompok yang bekerja sama secara terstruktur untuk

mencapai tujuan bersama. Menurut Robbins & Judge (2019), organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang berfungsi atas dasar yang relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan yang telah ditetapkan⁶. Dalam sebuah organisasi, tujuan adalah sebuah landasan bagi setiap tindakan yang diambil. Untuk mencapai tujuan tersebut, unsur-unsur seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, visi, misi, serta teknologi dan sumber daya lainnya perlu dikelola dengan baik. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai penggerak utama yang menentukan arah keberhasilan pencapaian tujuan. Organisasi dengan sumber daya manusia yang memiliki akses ke pengetahuan berkualitas mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam merancang solusi-solusi kreatif untuk menjawab tantangan operasional (internal) dan lingkungan (eksternal). Untuk memudahkan pengembangan sumber daya manusia, diperlukan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Pengelolaan pengetahuan (*knowledge*) dilakukan untuk mencegah kesalahan yang mahal dan berulang-ulang, mencegah penemuan kembali yang tidak perlu, kebutuhan untuk antisipasi prediksi yang akurat, serta kebutuhan yang muncul akan tanggapan yang kompetitif⁷. Oleh karena itu, suatu organisasi atau lembaga dapat menerapkan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) sebagai dukungan yang handal untuk meningkatkan daya saing.

Manajemen Pengetahuan (*knowledge management*) adalah serangkaian proses sistematis untuk mengidentifikasi, menciptakan, mengumpulkan, menyebarkan, dan memanfaatkan pengetahuan dalam suatu organisasi guna meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan strategis. Dalam konteks pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya dengan

⁶ Aziz Rachman dkk., *Dasar-Dasar Organisasi* (Makassar: CV Tohar Media, 2024), hlm. 2

⁷ Dr. Ratna Komala Putri, S.E., M.Si. dkk., *Knowledge Management* (Bandung: Lekkas (Lembaga Kajian dan Komunikasi Sosial), 2021).

mengarahkan orang-orang agar melaksanakan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan⁸. Suatu organisasi yang didukung oleh sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang handal akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi persaingan global. Manajemen pengetahuan mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh, menggunakan, dan mentransfer pengetahuan dalam organisasi. Dengan adanya manajemen pengetahuan, suatu organisasi atau lembaga dapat memastikan bahwa pengetahuan atau sumber pengetahuan yang ada dapat dijangkau oleh pihak yang relevan dan pada waktu yang tepat (Fransiskus & Sulistiowati, 2022). Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kinerja dan inovasi (Khalisa et al., 2024). Namun diperlukan penguatan lebih lanjut, seperti pengimplementasian teknologi yang mendukung manajemen pengetahuan secara optimal dan peningkatan kolaborasi antar tim kerja.⁹ Di era digital saat ini, organisasi dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kompetensi anggotanya, mempermudah kerja sama antar tim, dan menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan global, sehingga memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki kemampuan yang relevan untuk terus bersaing. Organisasi atau lembaga yang dapat mengelola pengetahuannya dengan baik cenderung lebih inovatif dalam menghadapi tantangan pasar.

Dalam konteks organisasi, mutu pengetahuan merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk individu yang unggul dan berkualitas demi keberlanjutan organisasi tersebut. Pengetahuan yang terstruktur dan mudah diakses dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan lebih efektif dan efisien. Namun, manajemen pengetahuan (*knowledge management*) menghadapi berbagai macam tantangan yang dapat memengaruhi mutu pengetahuan yang dikelola, misalnya kesenjangan akses dan validitas

⁸ Satrijo Budiwibowo & Sudarmiani, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018).

⁹ Nazla Khalisha dkk., "Literatur Review: Strategi Knowledge Management untuk Meningkatkan Inovasi dan Produktivitas Organisasi", dalam *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2, No. 10* (2024): 223-232.

informasi, perubahan paradigma akuisisi dan transfer pengetahuan, hingga kemampuan berpikir kritis dalam memverifikasi sumber, kreativitas dalam mengemas pengetahuan, kolaborasi dalam *knowledge sharing*, dan komunikasi dalam proses penyebarluasan informasi (diseminasi) agar organisasi mampu bersaing di era digital. Permasalahan lain yang sering dihadapi adalah bagaimana mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh individu menjadi pengetahuan yang dapat diakses, didokumentasikan, dan digunakan oleh seluruh anggota organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Banyak organisasi termasuk lembaga pendidikan dan pelatihan yang masih belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses yang mereka lakukan sesuai dengan standar mutu pengetahuan yang ditetapkan. Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa aset-aset pengetahuan tersebut dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi dengan mutu yang terjamin, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan organisasi secara berkelanjutan. Agar mutu tetap terjaga dan proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen mutu ke dalam proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Total Quality Management (TQM) atau *Knowledge Quality Assurance* (KQA) dalam konteks manajemen pengetahuan adalah sebuah pendekatan strategis dalam mengelola mutu pengetahuan yang menekankan pada perbaikan berkelanjutan melalui partisipasi seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan kualitas aset pengetahuan. Penjaminan mutu pengetahuan berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan keandalan sistem manajemen pengetahuan suatu organisasi atau lembaga dengan cara terus-menerus melakukan perbaikan pada berbagai aspek. Pendekatan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset pengetahuan yang diidentifikasi dan disebarkan adalah pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan standar akurasi, relevan, terkini, lengkap, dan

mudah dipahami. Selain itu, pendekatan ini juga menilai dampak dan hasil dari proses manajemen pengetahuan, meliputi validitas dari aset pengetahuan, peningkatan tingkat pemanfaatan pengetahuan, tingkat kesesuaian pengetahuan dengan kebutuhan operasional, tingkat partisipasi anggota dalam kontribusi pengetahuan, dan kepuasan anggota terhadap kualitas dan aksesibilitas pengetahuan yang disediakan.

Dalam penerapan manajemen mutu pengetahuan di suatu organisasi atau lembaga, diperlukan serangkaian tahap yang sistematis untuk memastikan bahwa proses pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan sudah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Implementasi penjaminan mutu pengetahuan berlandaskan pada beberapa pilar strategis, diantaranya: fokus pada pengguna pengetahuan; keterlibatan total anggota organisasi; perbaikan mutu berkelanjutan; pendekatan berbasis bukti dan data; serta manajemen proses pengetahuan.¹⁰ Bagi sebuah lembaga keuangan, modal finansial tidak lagi menjadi satu satunya aspek penting di era globalisasi saat ini yang ditandai dengan perubahan teknologi yang pesat dan dinamika pasar yang tak terduga. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para anggotanya menjadi keunggulan kompetitif untuk menjaga daya saing dan kredibilitas suatu lembaga. Literasi dan pengetahuan yang mendalam tentang instrumen yang berkaitan keuangan dan pasar modal sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Salah satu organisasi dalam bidang keuangan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui unit kerja pendidikan dan pelatihan, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia adalah salah satu lembaga eksekutif dalam pemerintahan yang memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemenkeu bertugas mengatur segala urusan keuangan negara, mencakup perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

¹⁰ Muhammad Bahy Naufal & Abd Muhith, "Paradigma Mutu Terpadu: Mentransformasi Pendidikan Untuk Masa Depan Gemilang", dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 10 No. 3* (2025): 1670-1674.

berbagai kebijakan strategis seperti fiskal, APBN, perbendaharaan, kekayaan negara, perpajakan, dan kepabeanan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang merata, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebagai komitmen kerja, Kemenkeu menetapkan visi “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.” Sejalan dengan visi tersebut, Kemenkeu menjalankan berbagai misi, diantaranya: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif; mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; serta mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut, Kemenkeu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 13 unit eselon I, 9 staf ahli, dan 1 unit non eselon. Masing-masing unit eselon tersebut memiliki fungsi khusus, diantaranya Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; Inspektorat Jenderal yang menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; Direktorat Jenderal Anggaran yang menyusun kebijakan penganggaran; Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani lalu lintas barang dan penerimaan dari bea masuk/keluar; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mengelola pembagian dan transfer keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mengelola aset negara; Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengatur arus kas negara; Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mengembangkan kapasitas dan inovasi sektor keuangan;

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang merumuskan dan melaksanakan analisis dan proyeksi ekonomi; Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang melaksanakan kebijakan pengelolaan utang, hibah, dan surat berharga negara; Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan yang melaksanakan pencegahan dan deteksi risiko keamanan siber; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) merupakan salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia pengelola keuangan negara yang kompeten, berintegritas, dan beretika. BPPK memiliki visi “Menghasilkan SDM pengelola keuangan negara yang Unggul dan Beretika dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan.” yang sejalan dengan misi Kemenkeu nomor lima, yaitu “mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.” Dalam mewujudkan visi tersebut, BPPK menetapkan misi sebagai berikut: mengelola pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan Corporate University; memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi bagi SDM keuangan negara dalam kerangka Kementerian Keuangan Corporate University; mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*; mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan Corporate University; serta mengembangkan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal. Seluruh upaya tersebut ditujukan untuk mendukung digitalisasi pembelajaran serta peningkatan kapabilitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimiliki Kemenkeu.

BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPK menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis,

rencana dan program pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan; pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan; pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara, penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program pelatihan di bidang keuangan negara, pengelolaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, pengelolaan tes terpadu dan manajemen beasiswa berdasarkan kebijakan teknis; pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BPPK terdiri dari Sekretariat Badan, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Keuangan Publik, dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu (Pusbin JFPM). Sekretariat Badan bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan strategis kepada semua unsur di lingkungan BPPK; Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen bertugas membina pelatihan di bidang kepemimpinan, penjenjangan pangkat, pembentukan karakter, peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural, manajemen pembelajaran, manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian internal, serta bidang lainnya terkait tata kelola pemerintahan yang baik; Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bertugas membina pelatihan dan sertifikasi kompetensi terkait keuangan negara di bidang anggaran dan perbendaharaan; Pusdiklat Pajak bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan serta penataran keuangan negara di bidang Perpajakan dan PBB; Pusdiklat Bea dan Cukai bertugas membina pendidikan, pelatihan dan sertifikasi

kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai; Pusdiklat Keuangan Publik bertugas membina pelatihan terkait keuangan negara di bidang kekayaan negara, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, kebijakan fiskal, sektor keuangan, intelijen ekonomi dan keuangan, dan bidang keuangan negara lainnya; serta Pusbin JFPM yang bertugas menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara, penjaminan mutu pembelajaran, akreditasi program pelatihan di bidang keuangan negara, pengelolaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, pengelolaan tes terpadu dan manajemen beasiswa. BPPK juga memiliki unit pelaksana teknis, yaitu Balai Diklat Keuangan (BDK) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BDK terdiri dari 11 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, diantaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Unit-unit tersebut bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dan berbasis kompetensi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan, serta saling berkolaborasi untuk memastikan profesionalisme dan kinerja sumber daya manusia yang optimal dalam pengelolaan keuangan negara.

Di era globalisasi dan perekonomian yang penuh tantangan dan serba cepat, setiap organisasi dituntut untuk selalu adaptif dan memiliki kinerja unggul, tidak terkecuali Kemenkeu yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan solutif dan berkualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi. Sebagai pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia pengelola keuangan negara yang kompeten dan berintegritas, pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) menjadi sangat penting bagi BPPK. Kemenkeu melalui *Kementerian Keuangan Corporate University (Kemenkeu Corpu)* merupakan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang merupakan bagian dari pencapaian visi dan misi Kemenkeu melalui perwujudan

keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja yang didukung dengan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) untuk mewujudkan Kemenkeu sebagai *learning organization* (LO). Kemenkeu Corpu diperkenalkan pertama kali pada tahun 2015 untuk mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi Kemenkeu. Melalui strategi tersebut, pembelajaran menjadi terintegrasi ke dalam suatu ekosistem, sehingga setiap pegawai tidak hanya memperoleh pembelajaran melalui pelatihan (*structured learning*), namun juga dapat belajar dari lingkungan sosialnya (*social learning*) dan dari unit tempat ia bekerja (*learning while working*). Oleh karena itu, BPPK berkomitmen untuk menjadi pengelola utama Kemenkeu Corpu dengan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu.

Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah pertama yang menerapkan konsep *Corporate University* melalui BPPK sebagai strategi pembelajaran berdasarkan prinsip *learning organization* untuk mendorong pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pada tahun 2023, BPPK meraih *silver award* sebagai “*Best Corporate University*” dalam kategori *Business Impact* dari *Global Council of Corporate University* dalam *GlobalCCU Awards* di Bangalore, India. *Kemenkeu Corpu* juga turut mendukung dalam pengembangan ekosistem *Corporate University* di Indonesia dengan secara rutin menjadi tujuan *benchmarking* dari berbagai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi (KLDI). Pada kurun waktu 2021-2024, terdapat 130 frekuensi *benchmarking* KLDI yang difasilitasi oleh *Kemenkeu Corpu*. BPPK dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki keunggulan strategis sebagai institusi pembelajaran yang telah mengintegrasikan infrastruktur digital KMS secara sistematis ke dalam siklus manajemen pengetahuan. Keunggulan organisasi ini terletak pada komitmen adaptifnya dalam menyusun panduan teknis pengelolaan manajemen pengetahuan secara mandiri yang menjadi contoh bagi unit Eselon lain.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi manajemen pengetahuan di sektor publik. Sebagai contoh, penelitian oleh Utami (2023) menemukan bahwa keberhasilan *Knowledge Management System* (KMS) di instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital dan komitmen SDM. Di sisi lain, kajian mengenai praktik *Total Quality Management* (TQM) terhadap *Knowledge Management* (KM) juga telah dilakukan oleh Thabrani & Ramadini (2021) dan Sipahelut & Ubjaan (2023), namun hanya berfokus pada layanan akademik perguruan tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mendeskripsikan bagaimana mekanisme penjaminan mutu diterapkan pada aset intelektual di lingkungan birokrasi pemerintahan. Di lingkungan BPPK, kajian yang pernah dilakukan oleh Khabibi & Hidayat (2022) terbatas pada implementasi manajemen pengetahuan secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis keterkaitan antara prinsip TQM dan manajemen pengetahuan dalam menjamin kualitas aset intelektual di BPPK. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan manajemen mutu pada aset-aset pengetahuan yang dikelola dalam proses manajemen pengetahuan di BPPK, dengan judul “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Aset Intelektual dalam Proses Manajemen Pengetahuan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia” dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini berpusat pada implementasi penjaminan mutu terhadap Aset Intelektual yang dimiliki oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan sub fokus sebagai berikut:

1. Gambaran Penjaminan Mutu Aset Intelektual di BPPK Kementerian Keuangan RI
2. Siklus dan Indikator Penjaminan Mutu Aset Intelektual di BPPK Kementerian Keuangan RI
3. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Aset Intelektual di BPPK Kementerian Keuangan RI
4. Standarisasi dan Validasi Mutu Aset Intelektual di BPPK Kementerian Keuangan RI
5. Pengelolaan dan Pemeliharaan Mutu Aset Intelektual di BPPK Kementerian Keuangan RI
6. Digitalisasi dan Optimalisasi Aset Intelektual di BPPK Kementerian Keuangan RI

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran umum terkait implementasi penjaminan mutu Aset Intelektual yang dilaksanakan di BPPK Kementerian Keuangan RI?
2. Bagaimana BPPK Kementerian Keuangan RI menerapkan siklus penjaminan mutu dan menetapkan indikator untuk menjamin kualitas Aset Intelektual?
3. Bagaimana kebijakan dan regulasi yang berlaku di BPPK Kementerian Keuangan RI mengatur prosedur spesifik terkait pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan Aset Intelektual dalam kerangka Manajemen Pengetahuan (*knowledge management*)?
4. Bagaimana mekanisme standarisasi dan validasi mutu pengetahuan yang menjadi acuan BPPK Kementerian Keuangan RI dalam menilai dan menjamin kualitas Aset Intelektual yang dimiliki?
5. Bagaimana BPPK Kementerian Keuangan RI mengelola dan memelihara Aset Intelektual secara berkelanjutan agar tetap memiliki mutu dan relevan dengan perubahan?
6. Bagaimana peran infrastruktur teknologi dalam mengintegrasikan sistem penjaminan mutu Aset Intelektual secara digital di BPPK Kementerian Keuangan RI?

D. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam terkait penerapan sistem penjaminan mutu pengetahuan yang disebut Aset Intelektual (AI) di lingkungan BPPK dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) sebagai gambaran evaluatif ke depannya. Urgensi dilakukannya penelitian ini tidak hanya didasarkan pada perbaikan internal bagi BPPK, melainkan juga sebagai bahan referensi dan pertimbangan strategis bagi unit kerja lainnya di lingkungan Kemenkeu dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu Aset Intelektual yang efektif, mengingat kebijakan manajemen pengetahuan ini berlaku untuk seluruh unit kerja Kemenkeu. Penelitian ini mengidentifikasi keselarasan antara kerangka kebijakan formal yang ditetapkan oleh BPPK, seperti regulasi dan standar mutu dengan praktik nyata dalam menjamin kualitas Aset Intelektual yang dihasilkan dan digunakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis mengenai penjaminan mutu yang bisa dimanfaatkan oleh BPPK untuk merumuskan strategi yang lebih terarah. Hasil penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan inovasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengetahuan, yang dapat meningkatkan mutu layanan, kredibilitas, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki BPPK.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang manajemen pendidikan, khususnya tentang manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dan penjaminan mutu, serta memberikan manfaat dan ilmu terkait pengimplementasian sistem penjaminan mutu dengan proses manajemen pengetahuan yang difokuskan pada Aset Intelektual di lingkungan lembaga pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini akan mengkaji aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan tahap evaluasi penjaminan mutu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

berkontribusi terhadap pengembangan kerangka konseptual implementasi siklus penjaminan mutu yang disesuaikan untuk menjamin validitas, relevansi, dan perlindungan aset-aset pengetahuan. Selain itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait strategi peningkatan mutu berbasis aset pengetahuan, maupun studi komparatif mengenai praktik penjaminan mutu dalam proses manajemen pengetahuan yang efektif di lembaga publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman melalui pengamatan atau observasi terkait proses penjaminan mutu pengetahuan, serta mengembangkan kemampuan analisis dalam mengevaluasi kebijakan mutu di suatu lembaga pendidikan dan pelatihan. Peneliti dapat memperluas wawasannya dalam konteks manajemen pendidikan, khususnya pada aspek manajemen pengetahuan (*knowledge management*) dan penjaminan mutu. Selain itu, peneliti dapat meningkatkan kompetensi dalam analisis kebijakan mutu pendidikan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di lingkungan lembaga pendidikan dan pelatihan profesional.

b. Bagi Prodi MP FIP UNJ

Penelitian ini juga memperkuat relevansi program studi Manajemen Pendidikan dengan isu aktual di lapangan, terutama dalam konteks penjaminan mutu di lembaga pelatihan sektor publik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dari Program Studi Manajemen Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan implementasi penjaminan mutu yang efektif dan efisien. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penguatan kurikulum, misalnya dijadikan studi kasus dalam mata kuliah yang relevan, seperti Manajemen Mutu Pendidikan dengan berfokus pada *Knowledge Quality Assurance*.

c. Bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi menyeluruh tentang efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu Aset Intelektual dalam proses manajemen pengetahuan (*knowledge management*) serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam aspek sistem mutu pengetahuan, dokumentasi aset pengetahuan, dan proses audit internal untuk peningkatan mutu di masa depan. Hasil penelitian ini dapat membantu BPPK Kemenkeu RI dalam menyusun rekomendasi terkait sistem penjaminan mutu berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem yang sudah berjalan, BPPK dapat terus memperkuat budaya mutu pengetahuan di lingkungan organisasi dalam rangka mewujudkan *Kemenkeu Corporate University*, serta meningkatkan implementasi penjaminan mutu di masa yang akan datang melalui rekomendasi yang didasarkan pada data penelitian.

d. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi badan pendidikan dan pelatihan lain yang juga menerapkan *Knowledge Management* (manajemen pengetahuan), yaitu sebagai sumber wawasan dan referensi dalam pelaksanaan penjaminan mutu pengetahuan yang efektif untuk meningkatkan mutu layanan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tolak ukur yang dapat digunakan oleh badan pendidikan dan pelatihan lain untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem penjaminan mutu agar lebih optimal. Dengan adanya identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam sistem penjaminan mutu, lembaga lain dapat mengantisipasi permasalahan serupa dan melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasinya.